

ACEP IWAN SAIDI

Kritik Sastra Indonesia Pokok-Soal yang Tak Kunjung Tercerahkan

Salah satu pokok persoalan dalam dunia kesusastraan Indonesia adalah masalah kritik. Persoalan tersebut berkisar di antara kekurangan dan kemandekan kritik sastra yang tidak kunjung tercerahkan. Dalam tiga dasawarsa terakhir ini, banyak orang mengatakan bahwa dunia kritik sastra Indonesia mulai mengalami persoalan setelah “tenggelamnya” kritik-kritik yang ditulis H. B. Jassin. Jika kita menengok ke belakang, ke sebuah masa sebelum Jassin muncul sebagai kritikus yang mumpuni, persoalan kritik itu sebenarnya telah menjadi bahan perdebatan justru sejak kritik itu sendiri mulai ditulis orang. Sejak Muhammad Yamin menulis kritik *Sejarah Melayu* (*Jong Sumatra*, No. 2-3, 1920) dan *Syair Bidasari* (*Jong Sumatra*, No. 6, 1921), persoalan kritik sudah mulai muncul. Perdebatan berikutnya terjadi antara kritik Sutan Takdir Alisjahbana yang dikatakan pragmatik dan Sanusi Pane yang disebut ekspresif (Pradopo 1995: 96–7).

Jika banyak orang mengatakan bahwa persoalan kritik sastra Indonesia muncul setelah Jassin tidak menulis lagi, hal itu tampaknya diakibatkan oleh kehadiran Jassin yang mampu meminimalkan permasalahan tersebut. Siapa-pun tahu, Jassin adalah tokoh sentral dalam dunia kritik sastra Indonesia. Kritik Jassin adalah kritik yang mampu memberikan “legitimasi” pada karya dan pengarangnya. Namun, sejak Jassin mulai menua dan karena itu tidak mampu lagi menulis—dan akhirnya meninggal pada 11 Maret 2000—permasalahan kembali muncul dengan tingkat keparahan yang berlipat.

Di bawah bayang-bayang kebesaran Jassin, para kritikus generasi berikutnya seakan-akan tidak berdaya untuk “berbicara”. Penyakit itu akut. Pada dasawarsa akhir abad ke-20, yang sering muncul justru bukan kritik, melainkan perdebatan tentang kekurangan dan atau kematian kritik tersebut. Celaknya, perdebatan itu sering sangat bertele-tele, melingkar-lingkar, dan karenanya sangat menjenuhkan. Dari dulu hingga kini persoalannya selalu berputar-putar pada lingkup yang sama, yakni kurangnya kritikus yang berwibawa, tidak sejalanannya pandangan kritikus dengan sastrawan, kritik yang meninggalkan teks, metodologi yang *kedodoran*, kritik yang tidak membumi, dan pertentangan antara kritik akademis lawan nonakademis.

Lantas, apa umumnya yang dilontarkan para pelaku polemik itu? Kebanyakan dari mereka ternyata hanya bisa saling menuduh. Salah satu pihak yang paling sering dituduh adalah lembaga pendidikan menengah yang dianggap tidak berhasil dalam pengajaran sastra. Taufik Ismail adalah salah seorang tokoh yang paling sering menuding lembaga tersebut. Sementara itu, dalam sebuah artikelnya, Lukman Ali juga melemparkan tuduhan senada (*Kompas* 9/5/1997). Menurut mantan Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa tersebut, dalam 25 tahun terakhir ini dunia sastra praktis berjalan tanpa kritik yang memadai. Kritik sastra Indonesia tidak tumbuh secara baik karena penulis kritik sekarang kebanyakan amatiran dan hadir karena dikarbit. Ulasan-ulasan yang muncul bukannya membantu pembaca dalam menikmati karya sastra, tetapi justru membingungkan. Cikal bakal persoalan ini, menurut Lukman Ali, adalah ketidakmampuan guru sekolah menengah dalam mengajarkan sastra.

Jika dicermati, tuduhan yang dilontarkan Lukman Ali tersebut jelas tidak kuantitatif. Berapa ribu pembaca yang ia wakili sehingga berani mengatakan bahwa kritik sastra sekarang telah membingungkan pembaca. Tudingannya terhadap guru sekolah menengah juga tidaklah adil. Ia bukan sebuah solusi, melainkan justru memancing timbulnya tuduhan-tuduhan lain yang lebih rumit. Guru sekolah menengah dengan serentak pasti akan menjawab bahwa persoalannya bukan terietak pada mereka, melainkan pada kurikulum, jam pelajaran yang kurang, mata pelajarannya hanya menempel pada bahasa, fasilitas yang tidak memadai, dan sederet pembelaan lain yang bisa saja direkayasa menjadi sangat argumentatif.

Bertolak dari kerumitan persoalan akibat perilaku kita yang gemar saling tuding tersebut, bagaimanakah permasalahan kritik sastra ini harus ditengarai sehingga menjadi tercerahkan. Tanpa harus menunjuk pihak-pihak tertentu sebagai kambing hitam, tulisan ini mencoba mendedahkan semacam catatan ringan tentangnya.

MENCATAT SESUATU YANG TERLEWATKAN DARI JASSIN

Jassin telah wafat, tetapi namanya tidak mungkin bisa terhapus. Dalam dunia kritik sastra Indonesia, Jassin merupakan sebuah nama besar yang telah menjadi mitos. Kedudukannya dalam khasanah kesusastraan Indonesia tidak bisa digantikan siapapun. Teeuw, dalam *Sastra Indonesia Modern* (1976) memberinya julukan "penjaga kesusastraan Indonesia." Gajus Siagian menyebutnya sebagai Sang Paus Sastra (*Kisah* Th. V/1, 1957).

Namun, apakah kita hanya berhenti sampai pada pencatatan demikian ketika mempelajari Jassin. Harus diakui bahwa selama ini kebanyakan perbincangan kita tentang Jassin memang tidak beranjak dari soal tersebut.

Selanjutnya, kita lebih sering melontarkan pertanyaan yang tidak tepat, mengapa saat ini tidak ada kritikus sebesar Jassin. Pertanyaan ini jelas tidak mengandung implikasi historis sehingga jawabannya sering sangat berbelit-belit, dibuat-buat, bahkan tidak jarang memancing perdebatan emosional. Pendapat Lukman Ali yang dikutip di atas adalah salah satu contoh jawaban yang bisa ditunjuk.

Perdebatan semacam itu pasti harus segera dihentikan jika para penggagas dan hamba-hamba kesusastraan Indonesia tidak mau kehilangan nilai sebuah karya sastra yang telah dengan susah payah diciptakan seorang pengarang. Salah satu cara yang harus ditempuh untuk mengatasinya adalah dengan menempatkan sosok Jassin sebagai fenomena sejarah yang harus dibongkar dan dipelajari kembali. Jadi, pertanyaannya bukan mengapa kini tidak ada kritikus sebesar Jassin, melainkan mengapa Jassin menjadi kritikus yang eksis pada zamannya. Jawaban atas pertanyaan ini tentu merupakan sebuah pembelajaran terhadap proses panjang yang dijalani Jassin dalam usaha mencapai eksistensinya itu.

Posisi Jassin sebagai tokoh sentral dalam kritik sastra Indonesia tentu saja bukan sesuatu yang serta-merta diperoleh atau jatuh dari langit, melainkan melalui perjuangan panjang yang bagi kebanyakan orang pasti sangat melelahkan. Kerajinan dan keuletan Jassin dalam melakukan pendokumentasian sastra sehingga menghasilkan bukti konkret Pusat Dokumentasi H. B. Jassin adalah sebuah pekerjaan yang sangat mengagumkan. Upaya ini, sungguh tidak bisa diukur dengan materi.

Akan tetapi, dalam fungsinya sebagai kritikus, sebenarnya ada hal lain di luar persoalan sastra tetapi sangat menunjang usaha pencapaian eksistensinya di dunia kritik yang dimiliki Jassin, yakni keterlibatannya di dunia media massa. Di samping seorang kritikus dan dokumenter, Jassin adalah seorang jurnalis sastra. Sejak zaman Pujangga Baru, penulis yang lahir pada 1917 (angkatan Balai Pustaka) ini telah mencatatkan dirinya sebagai sekretaris sidang redaksi majalah *Pujangga Baru*. Di sini, ia sempat menulis kritik tentang *Belenggu* karya Armijn Pane. Selanjutnya, setelah zaman kemerdekaan, Jassin terus menggiatkan dirinya di media, baik sebagai pendorong, redaktur, maupun editor majalah kesusastraan (Teeuw 1976). Majalah *Panji Pustaka*, *Mimbar Indonesia*, *Zenit*, *Kisah*, *Sastra*, dan *Horison* adalah beberapa media yang pernah dikelolanya.

Melalui media tersebut, Jassin secara mudah dapat mengomunikasikan hasil kerjanya kepada pembaca. Sebagai redaktur, tulisan Jassin jelas tidak akan terbendung oleh pihak di luar media yang dikelolanya. Hal inilah yang sering dilupakan orang. Beberapa penulis memang ada yang mengedepankan

keterlibatan Jassin di berbagai media tersebut, tetapi hal itu sebatas catatan biografi belaka. Sampai sebatas mana hal itu ikut membentuk eksistensi Jassin sebagai kritikus, tidak pernah ada yang mengkajinya. Padahal, di samping kerajinannya dalam menulis, kedudukannya yang kuat di berbagai media tersebut sangat mendukung tersebarnya kritik Jassin sehingga kemudian ia menjadi semacam wacana dalam benak masyarakat pembacanya. Sementara esensi kritiknya sendiri, misalnya dalam bukunya, *Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esei* (I-IV) yang merupakan kumpulan tulisan dari berbagai media itu, ternyata tidak menunjukkan kritik yang ideal. Kritik-kritiknya lebih bersifat deskripsi, mengambang, “bolong-bolong,” dan karenanya terbuka untuk dikoreksi atau dipertanyakan.

Kenyataan kritik Jassin yang demikian itu sebenarnya bukan tidak pernah ada yang mempersoalkan. Rachmat Djoko Pradopo, misalnya, pernah menilai kritik Jassin lebih bersifat impresionistis, yaitu hanya berupa uraian dan kesan-kesan kritikus mengenai isi sajak yang ditulis penyair. Kritik Jassin, menurut Pradopo, bahkan hanya berupa kutipan sajak tanpa diapa-apakan (Pradopo 1988: 157). Sementara itu, Teeuw (1980: 168) berpendapat bahwa sebagai esais dan ahli kritik, Jassin tidak pernah mencapai tingkat kecemerlangan Sitor Situmorang dan Asrul Sani. Sumbangan-sumbangannya terhadap kritik sastra, menurut Teeuw, harus dipandang sebagai keterangan yang sehat dan berguna, tetapi bukan sebagai analisis yang mendalam dan mengagumkan.

Bagaimana efek kritik tersebut pada “kekuatan” tulisan Jassin? Jawabannya bisa dibilang tidak ada. Jassin tetap berdiri sebagai “monumen” tak tergoyahkan. “Dialognya” dengan sajak-sajak Chairil Anwar kemudian mencuatkan namanya ke titik sentral keberhasilannya sebagai kritikus. Chairil pun kemudian menjadi “monumen” lain yang diciptakan Jassin dengan kekuatan yang juga tidak bisa sembarang diguncang. Kekuatan ini tercipta sebagai salah satu indikasi dari posisi Jassin yang kuat dalam media publik, khususnya media sastra yang tangguh pada zamannya.

Sebagai bahan perbandingan bagaimana kuatnya media mempengaruhi eksistensi seorang kritikus, dapat dikemukakan Saini KM sebagai sosok kritikus yang dihormati di Bandung. Tokoh ini sering disebut-sebut sebagai guru para penyair Bandung pada era 1980-an. Beni Setia, Acep Zamzam Noor, Soni Farid Maulana, Agus R. Sardjono, dan Beni R. Budiman adalah beberapa contoh penyair yang pada awalnya dibesarkan Saini. Mengapa Saini eksis? Salah satu jawabannya tidak lain karena Saini “memiliki” media publik. Melalui rubrik “Pertemuan Kecil” pada harian *Pikiran Rakyat*, Saini terus melakukan pembinaan.

Sayangnya, Saini bukan kritikus sebagaimana Jassin. Ia adalah seorang sastrawan sehingga tulisan-tulisan pendeknya sebagai pengantar rubrik tersebut lebih bersifat "mencipta" dan mendidik penyair melalui proses kreatif daripada membesarkannya melalui kritik. Akibatnya, tidak ada penyair "ciptaan" Saini yang unggul atau diunggulkan sebagaimana Jassin melakukannya pada Chairil. Sayangnya pula, Saini tidak sekonsisten Jassin. Karena berbagai kesibukan dalam jabatannya yang baru sebagai direktur sebuah direktorat di jajaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Saini pun mundur dari "Pertemuan Kecil."

Apakah yang bisa diambil dari pembelajaran terhadap fenomena Jassin dan juga Saini KM itu? Satu hal dapat kita raih, yakni eksistensi seorang kritikus sastra bisa sangat kuat dipengaruhi oleh keberadaannya di media publik. Hal ini berarti, jika persoalan kritik sastra Indonesia yang kini semakin memprihatinkan tersebut mau diatasi, para redaktur budaya di berbagai media, terutama media sastra, harus berperan sebagai kritikus, atau sebaliknya, kritikus sastra sebaiknya menjadi redaktur budaya di media massa. Hal inilah yang sering tidak kita sadari dalam setiap perbincangan mengenai kritik sastra Indonesia. Jika diperhatikan, saat ini umumnya "penjaga gawang" kebudayaan di berbagai media adalah sastrawan, bukan kritikus. Sebut saja, misalnya, Bre Redana (cerpenis) yang menjadi redaktur seni budaya *Kompas*, Ahmadun Yosi Herfanda (penyair/*Republika*), Leila S. Chudori (cerpenis/*Media Indonesia*), Uumbu Landu (Penyair/*Bali Pos*), Suyatna Anirun (dramawan/*Pikiran Rakyat*), Diah Hadaning (penyair/*Sivadesi*), dan Sutardji Calzoum Bachri (penyair/*majalah Ceria*).

Karena redakturnya sastrawan, perhatian media tersebut dengan sendirinya lebih terfokus pada karya, bukan kritik. Kesemarakannya cerpen dan puisi yang dimuat di berbagai media pun tidak pernah diimbangi oleh kritik. Si redaktur tampaknya tidak merasa tertarik untuk mengulas karya yang dimuatnya sebab memang kompetensinya bukan di situ. Hal ini juga bisa mengindikasikan bahwa seleksi yang dilakukannya terhadap sebuah karya sehingga ia dimuat masih bisa dipertanyakan karena merupakan hasil seleksi sastrawan. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap para redaktur sastra yang sastrawan itu, pertanggungjawaban objektif atas karya yang dimuatnya di sebuah media perlu diragukan. Juga tidak ada maksud menganggap rendah hasil kerja sastrawan di bidang itu, apalagi menganggap mereka tidak bisa menulis kritik yang baik. Siapapun bisa dan bebas menulis kritik sastra. Hanya, patut di hargai dan dipercayai sebuah kerja profesional, dalam hal ini berarti *basic* ilmu yang dimiliki akan lebih bisa dipercayai. Jika penyair adalah

seorang penulis puisi, karya puisinyalah yang lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada penilaiannya atas sebuah puisi sehingga ia laik muat.

John Crowe Ransom, salah seorang penggagas *new criticism*, dalam *Critic Corporation* (1937) menyebutkan tiga pihak yang berkompotensi dalam melakukan kritik, yakni seniman (penyair), ahli filsafat, dan para akademisi sastra. Dari ketiga pihak tersebut, menurut Ransom, yang terakhirlah yang kritiknya dapat dipertanggungjawabkan. Kritik seniman biasanya bersifat intuitif, sedangkan ahli filsafat, meskipun banyak mengetahui fungsi seni, penglihatannya lebih terarah pada kayu daripada pohonnya.

Bertolak dari hal tersebut, sekali lagi, sudah saatnya disadari bagaimana para kritikus harus berperan di media massa. Jika saat ini redaktur sastra telah didominasi sastrawan, harus segera diciptakan semacam *bargaining* dengan para kritikus yang kini lebih cenderung bergerak di "ruang hampa" di luar media publik. Para sarjana sastra yang sebenarnya potensial untuk menulis, tetapi tidak punya ruang untuk berkatakata tersebut, bahkan di antaranya ada yang alergi terhadap kritik sastra jurnalistik, harus semakin sadar bahwa pentingnya media massa dalam perkembangan kritik sastra Indonesia tidak bisa ditawar lagi.¹

Jika di sebuah media massa terdapat rubrik kritik, sependek apapun—sebagai indikasi dari redaktur yang kritikus atau kritikus yang redaktur—di situlah redaktur sastra dituntut untuk menulis kritik yang tajam terhadap karya yang dimuatnya. Penilaian yang *judicial* dari redaktur yang juga berperan sebagai kritikus tersebut, pasti akan berpengaruh besar pada perkembangan sastra Indonesia. Jika hal ini dilakukan secara intens dan komprehensif, tidak tertutup kemungkinan akan muncul sosok-sosok Jassin baru, bahkan mungkin memiliki pengaruh lebih kuat.

KONSEKUENSI UNTUK KRITIK AKADEMIS

Usulan agar para redaktur sastra yang sastrawan melakukan *bargaining* dengan para kritikus (sarjana sastra) dan/atau menyarankan supaya para kritikus "melangkahkah kakinya" ke media massa mengalihkan uraian ini ke dunia kritik lain yang sering dipertentangkan dengan kritik sastra populer di atas, yakni kritik sastra akademis. Mengalihkan pandangan ke dunia kritik yang lebih spesifik ini juga berarti harus melihat berbagai persoalan yang tidak kalah rumit di "belahan dunia" kritik yang inipun orang tidak kalah

¹ Gagasan ini pernah saya lontarkan dalam Pilnas IX dan Seminar Hiski di Fakultas Sastra Universitas Diponegoro Semarang melalui makalah berjudul "Peranan Sarjana Kesusastraan dalam Perkembangan Sastra di Daerah" (Bandungan, 22–24 Oktober 1998). Selanjutnya, usulan serupa saya tulis dalam *Bandung Pos* (14–15 November 1998) dengan judul "Revormasi Kritik Sastra."

sengit berdebat. Sebagaimana kritik sastra populer yang dianggap mati, kritik sastra akademis pun dituduh tidak bisa berbuat banyak dalam perkembangan sastra Indonesia.

Rustandi Kartakusumah (1960) pernah menulis, jika sekiranya kritik akademis (ilmiah) masih ada harganya di Barat, di Indonesia akan menambah kekacauan ukuran dan sama sekali tidak akan memberi wawasan. Menurut Rustandi, kritik sastra ilmiah hanyalah menafsirkan belaka, bukan menilai (Pradopo 1995: 100). Lebih dari tiga dasawarsa kemudian (1992) Budi Darma melontarkan kritik senada. Menurutnya, kritik sastra akademik yang berwujud skripsi, tesis, disertasi, dan beberapa karya ilmiah pada hakekatnya bukan tulisan. Acuan sekian banyak tulisan itu bukanlah substansi, tetapi formalitas (*Horison*, No. 11, November 1992).

Demikianlah contoh tudingan terhadap kritik akademis yang dilontarkan dua tokoh sastra dalam rentang waktu yang cukup lama. Bisa dibayangkan, selama rentang waktu 1960–92 penilaian orang terhadap kritik sastra akademis sama negatifnya. Hal ini berarti bahwa para akademisi tidak pernah mencoba melakukan evaluasi terhadap sistem penulisan karya ilmiah yang telah dilakukan bertahun-tahun tersebut. Sampai tulisan ini dibuat, hal itu belum juga dilakukan.

Oleh sebab itu, tulisan ini mencoba mengajak berbagai pihak untuk melakukan evaluasi terhadapnya. Dalam kaitan ini, pertanyaan pertama yang harus segera dijawab adalah—mengapa kritik sastra akademis itu demikian buruk sebagaimana dikatakan dua tokoh tersebut. Sebagaimana diketahui, kritik sastra akademis adalah kritik sastra yang ditulis dengan pola-pola tertentu. Jalan pikiran para kritikusnya adalah jalan pikiran yang sesuai dan/atau disesuaikan dengan pola-pola tersebut. Pada tingkat ideal, dengan pola-pola itu kritik sastra akademis diharapkan dapat menjadi obyektif. Salah satu turunan teknis yang harus ditempuh adalah memperbanyak kalimat pasif dalam penyusunannya. Kemunculan subyek penulis sedapat mungkin harus diminimalkan.

Akibat dari teknik penulisan semacam itu, subyek penulis menjadi memudar, jika tidak mau dikatakan mati. Hal ini berarti bahwa yang menilai karya sastra bukan penulis dalam arti sebagai subyek yang bebas, melainkan teori yang mengikat pola pikir penulis (subyek yang terikat). Keadaan ini menyebabkan kritik sastra akademis menjadi sangat tertib, tetapi monoton. Indikasi lainnya adalah kritik cenderung bergerak ke dalam, ke formalitas sebagaimana dikemukakan Budi Darma di atas. Dengan perkataan lain, kritik demikian cenderung melakukan pendangkalan terhadap makna karya sastra itu sendiri.

Persoalan lain yang muncul bersamaan dengan hal tersebut adalah hilangnya sikap kritis terhadap teori. Jika dicermati, kebanyakan akademikus sangat "ketakutan" dalam menghadapi teori. Teori telah menjadi mitos yang mengandung sejuta kebenaran yang tidak boleh disanggah. Apa yang terdapat dalam teori adalah titik final. Tidak adanya dialog dengan teori itulah yang tampaknya telah menjadi salah satu ciri kemapanan "orang kampus." Dunia kritik sastra akademis menjadi dunia tanpa inovasi. Ia tenang dan steril dari persoalan-persoalan kontekstual yang melingkarinya. Keadaan demikian, jelas, berbanding terbalik dengan dunia sastra itu sendiri yang sering melakukan pendobrakan atas kemapanan tradisi. Akibatnya, kritik sastra akademis yang katanya tidak mau meninggalkan teks malah ditinggalkan teks.

Pertanyaanya kemudian bagaimana persoalan tersebut harus ditengarai. Banyak jawaban yang mungkin diberikan. Salah satu yang terpenting adalah melakukan pendobrakan terhadap sistem dan meninggalkan pola pemikiran kelembagaan yang telah mentradisi itu. Rasanya bukan hal tabu jika teori yang cenderung angkuh dan memisahkan diri dari realitas keseharian tersebut mulai "ditinggalkan." Dalam bentuk paling jelas, maksud pernyataan tersebut adalah mengubah bentuk kritik sastra akademis ke dalam bentuk lain yang lebih konkret dan bumi. Bentuk baru ini hendaknya juga tidak dibebani cita-cita obyektivitas kritik sebagaimana selama ini disandangkan pada karya ilmiah. Dalam karya bentuk baru itu, subyek penulis harus "dibiarkan bebas" bergerak ke berbagai arah.²

Sebagai jawaban konkret, esei ditawarkan sebagai alternatif kritik akademis bentuk baru tersebut.³ "Genre" ini diusulkan berdasarkan asumsi bahwa esei adalah jenis tulisan paling "longgar." Di dalam esei, subyek penulis lebih leluasa bergerak. Esei menghadirkan penulis sebagai subyek yang bertanggung jawab atas setiap kata yang dituliskannya. Esei juga tidak tanpa teori. Justru pada orang yang telah sangat mengerti sekaligus mampu mengkritisi teorilah, esei dapat muncul. Pada esei, teori melebur dan bersenyawa dengan pandangan subyektif penulis sehingga tercipta ketajaman analisis dan "perenungan ilmiah." Walhasil, esei memiliki dua unsur yang

² Dalam beberapa pertemuan kuliah, Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono juga mengisyaratkan hal ini. Dengan memberikan beberapa contoh penulisan karya ilmiah di perguruan tinggi asing, Sapardi menyarankan agar tulisan-tulisan ilmiah berupa skripsi, tesis, dan disertasi ditulis dalam bentuk yang lebih "bebas," tidak kaku seperti sekarang ini.

³ Usulan ini pernah saya tulis di *Kompas* (5 Mei 1996) dengan judul "Rekonstruksi Kritik Akademis dalam Esei."

sangat penting dan menarik, yakni mencerminkan kemampuan ilmiah dan kepekaan sosial.⁴

Berdasar pada dua hal tersebut, jika penulisan esei dihubungkan dengan proses kreatif penulisan karya sastra, akan ada titik singgung yang esensial. Karya sastra selalu memediasi realitas ke dalam dunia rekaan, sementara esei memiliki kepekaan ilmiah dalam menangkap fenomena keseharian dalam realitas. Dengan demikian, keduanya bergerak pada satu titik bidik yang sama, yakni realitas. Maka, jika esei mengambil karya sastra sebagai objek penulisan, akan muncul sebuah kritik yang “bergerak ke luar,” yaitu kritik yang menghubungkan karya sastra dengan realitas keseharian di masyarakat. Di samping itu, tanpa adanya ikatan dari teori apapun, esei mempunyai peluang besar menghasilkan kritik yang substansial dan inovatif, kritik yang lepas dari kekangan atribut-atribut formal.

PENUTUP

Demikianlah tulisan ini telah mencoba mendedahkan satu pokok persoalan dalam dunia kesusastraan Indonesia, yakni masalah kritik sastra yang tidak kunjung tercerahkan. Juga telah ditawarkan beberapa alternatif pemikiran untuk kepentingan pencerahannya.

Jika alternatif pemikiran tersebut disarikan, hal terpenting dalam “penyelesaian” masalah kritik sastra Indonesia adalah memfungsikan sarjana sastra sebagai kritikus yang menyatu dengan berbagai gejala kesusastraan di masyarakat melalui kedekatan hubungannya dengan media massa. Usaha ini menuntut para sarjana untuk piawai menulis. Agar tuntutan ini terpenuhi, pihak akademis harus berusaha menciptakan atmosfer yang kondusif dalam mengembangkan kreativitas kepenulisan para calon sarjana bersangkutan. Salah satu caranya adalah mengubah sistem penulisan karya ilmiah dengan sebuah “genre” yang lebih memberi peluang kreativitas itu sendiri. *Genre* tulisan yang dimaksud adalah esei.

Jika kebebasan kreatif para akademikus telah terbentuk, persoalan kritik sastra Indonesia akan tercerahkan bukan terselesaikan karena persoalan dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora memang tidak akan pernah bisa

⁴ Budi Darma, dalam bukunya, *Sejumlah Esei Sastra* (1984), h. 9–12 mengemukakan hakikat dari esei sastra. Ia antara lain mengatakan, “esei sastra yang baik merupakan perjuangan pengarangnya untuk mengadakan percakapan dengan diri sendiri mengenai masalah sastra yang menarik perhatiannya. Pengarang memberi argumentasi dan kontra argumentasi terhadap dirinya sendiri. Karena itulah, pengarang esei sastra yang baik menolak untuk berbicara mengenai masalah yang tidak diakrabinya.” Jadi, sebuah tulisan berupa esei dengan sendirinya menuntut sikap dan pendirian yang tegas dari penulisnya, ia buka tulisan karbitan seperti kebanyakan karya ilmiah selama ini.

diselesaikan). Di samping itu, perbedaan antara kritik sastra populer dengan akademis yang sering diperdebatkan orang (padahal tidak perlu!) bisa diminimalkan. Kampus pun tidak akan lagi menjadi penjara "black box" yang mengkerangkeng para akademisi sehingga ia steril dari berbagai persoalan aktual dan kontekstual di masyarakat. Jika menara gading tidak mau dirobohkan, harus dibuat tangga yang menghubungkannya ke bumi. Tulisan ini telah mencoba menawarkan tangga itu.

DAFTAR ACUAN

- Darma, Budi (1984), *Kumpulan Esei Sastra*. Jakarta: PT Karya Unipress
- Eneste, Panusuk (1988), *Menjelang Teori dan Kritik Sastra Indonesia yang Relevan*. Bandung: Angkasa
- Hough, Graham (1966), *An Essay on Criticism*. New York: W.W. Norton & Company Inc.
- Iwan Saidi, Acep (1993), "Kritik Sastra, Sebuah Tantangan," *Bandung Pos*, September.
- (1996), "Sastra dalam Manajemen Isu," *Kompas*, 10 Maret.
- (1996), "Rekonstruksi Kritik Akademis dalam Esei," *Kompas*, 5 Mei.
- (1998), "Peranan Sarjana Kesusastraan dalam Perkembangan Sastra di Daerah," makalah Pilnas IX dan Seminar Hiski, Fakultas Sastra Universitas Diponegoro Semarang, 22–24 Oktober 1998.
- (1998), "Reformasi Kritik Sastra," *Bandung Pos*, 14–15 November.
- Jassin, H.B. (1985), *Kesusastraan Indonesia dalam Kritik dan Esei (I–IV, edisi yang diperbarui)*. Jakarta: Gramedia.
- Pradopo, Rachmat Djoko (1995), *Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik, dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.